

## **KECAMATAN BHATIN II PELAYANG PASCA PEMEKARAN DI KABUPATEN BUNGO 2005-2020**

Wiwik Asmawati<sup>1</sup>, Zulfa<sup>2</sup>, Refni Yulia<sup>3</sup>

Fakultas Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sumatera Barat<sup>1</sup>, Fakultas Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sumatera Barat<sup>2</sup>, Fakultas Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sumatera Barat<sup>3</sup>  
wiwikasmawati08@gmail.com<sup>1</sup>, zulvaefa75gmail.com<sup>2</sup>, refniyulia17@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk Mendeskripsikan Latar Belakang Proses Pemekaran Kecamatan Bhatin II Pelayang, (2) Untuk Mendeskripsikan Perkembangan Kecamatan Bhatin II Pelayang Setelah Pemekaran 2005-2020. Penelitian ini menggunakan metode dalam penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut, heuristik yaitu pengumpulan data. Kritik sumber yaitu melakukan pengujian terhadap keaslian data. Interpretasi yaitu memahami makna dan menafsirkan informasi yang telah terkumpul. Historiografi yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk ilmiah atau skripsi. Hasil dari penelitian ini perkembangan Kecamatan Bhatin II Pelayang setelah pemekaran mengalami perubahan dan kemajuan dari tahun ke tahun baik di aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Perubahan ini terlihat dari bertambah nya satu desa serta sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan, pembangunan jalan, dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Bhatin II Pelayang.

**Kata Kunci:** *Bhatin II Pelayang, Pasca, dan Pemekaran di Kabupaten Bungo*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi pemicu maraknya fenomena pemekaran daerah semenjak memasuki era reformasi, sebagaimana yang tertulis didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan saat ini dirubah kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadaan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi.(Muqoyyidin 2013)

Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang semula sentralistik menuju paradigma desentralistik. Desentralistik bermakna dengan kedekatan, keterkaitan, otonomi, partisipasi, akuntabilitas, dan demokrasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja. Oleh karenanya pendekatan kebijakan pembangunan diubah menjadi desentralistik dan otonomi daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. (Rozali:2000) Desentralisasi merupakan suatu penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah diartikan sebagai wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah semenjak digulirkan reformasi membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat, ide-ide pemekaran daerah bermunculan dalam membangun daerah dengan didukung oleh tersedianya sumber daya manusia serta peraturan yang tertata dengan baik dan kondisi daerah itu sendiri. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, daerah banyak menuntut adanya pemekaran. Alasan mendasar terjadinya pemekaran daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat lokal. Selama ini, sumber daya cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tertinggal. Selain itu, pemekaran juga untuk peningkatan pelayanan sehingga tidak perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu ke provinsi/kabupaten. (Mudrajat Kuncoro:2012)

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh dari pusat merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan. Jarak pemerintahan yang relatif jauh tentu berpengaruh terhadap pelayanan publik serta menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas - tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru.

Pelayang adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Muara Bungo, merupakan desa yang cukup luas dengan memiliki potensi alam yang cukup baik

dibandingkan daerah lainnya. Pelayang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Tanah Tumbuh. Pelayang ini merupakan Kecamatan yang ke 15 yang berada di Kabupaten Bungo. Pelayang Sebelum dimekarkan merupakan salah satu daerah yang terisolir dan terpencil serta kurang nya perhatian dari pemerintah pusat, jauhnya akses transportasi dari daerah hingga ke pusat menyebabkan pelayanan menjadi kurang baik dibidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu huru-hara yang membingungkan di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam membina dan membangun, apalagi untuk mengatasi terjadinya keributan anak sesama sekolah juga termasuk para remaja dan dibidang keamanan lain.

Pemekaran kecamatan Pelayang ini bermula dari pemekaran daerah lainnya yang sudah melepaskan diri dari pemerintah induk. Keinginan dari masyarakat Pelayang dalam membentuk kecamatan baru membawa gejolak pemekaran sampai pada daerah ini. Mengingat daerah Pelayang ini memiliki potensi ekonomi yang sangat baik, yaitu dari bidang perkebunan seperti perkebunan karet dan perkebun sawit sebagai penopang mata pencaharian masyarakat dalam melangsung kehidupan. Perkembangan jumlah penduduk serta luas wilayah daerah Pelayang dan kehidupan sosial masyarakat yang sudah memenuhi syarat dalam sebuah pembentukan daerah baru. Selain itu potensi sumber daya alam yang berada di daerah ini menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengelola sumber daya tersendiri, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. (Pantow et al:2019)

Tanggal 22 September 2004 malam kamis 21 Wib bertempat di Los Pasar Sore Desa Pelayang. Masyarakat empat Desa yaitu Pelayang, Peninjau, Talang Silungko dan Pulau kerakap mengadakan rapat, rapat yang diadakan empat desa ini bertujuan untuk mengajukan permohonan Pemekaran. Masyarakat empat desa tersebut sepakat meminta dijadikan empat desa tersebut menjadi satu Kecamatan baru, sebagai pemekaran kecamatan dari Kecamatan Tanah Tumbuh. Selanjutnya

pada malam minggu, tanggal 02 Oktober 2004, bertempat di balai desa Peninjau telah melaksanakan rapat empat desa yaitu desa Pelayang, Peninjau, Talang Silungko, dan Pulau Kerakap. Rapat ini diadakan dalam rangka menindaklanjuti pertemuan atau rapat akbar dengan Bapak Bupati Bungo, Ketua DPRD Bungo, beserta anggotanya dan rombongan dari Muara Bungo, yang membahas tentang pemekaran empat tersebut meminta supaya dijadikan kecamatan tersendiri sebagai pemekaran dari Kecamatan Tanah Tumbuh.

Berikutnya pada tanggal 3 Oktober 2004, setelah mendengar dan menerima aspirasi dari masyarakat, panitia pemekaran Pelayang mengajukan permohonan Pemekaran empat desa dan mengusulkan Kecamatan Bhatin II Pelayang kepada Bupati Muara Bungo Zulfikar Achmad sebagai kecamatan baru dan memisahkan diri dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Tanah Tumbuh. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Kecamatan Bhatin II Pelayang ini telah memenuhi syarat dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, social politic, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan serta meningkatnya beban tugas volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Proses yang begitu panjang yang harus dilewati dalam mencapai tujuan untuk membentuk kecamatan baru, dimulai dari pembentukan panitia, penyusunan penyusunan rencana pemekaran sampai dengan peninjauan oleh tim kabupaten bungo, Maka pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bhtain II Pelayang Kabupaten Bungo. Mengingat Perda No 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pelayang Keluarlah Keputusan Camat Bhatin II Pelayang Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Atau Peresmian Kecamatan Bhatin II Pelayang dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat dengan telah dibentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang yang menjadi empat desa, yaitu, Desa Pelayang, Desa Peninjau, Desa Talang Silungko Dan Pulau Kerakap.

Kecamatan Bhatin II Pelayang sejak berdirinya melalui proses perjuangan yang cukup panjang, mengingat daerah ini sudah dua kali melakukan pemekaran sebelum menjadi kecamatan tersendiri. Pemekaran Kecamatan Pelayang ini dari dulu sudah direncanakan, tetapi tidak adanya kesempatan untuk melakukan pemekaran daerah, selain itu terbentuknya Kecamatan Pelayang merupakan puncak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidak merataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan serta kurangnya keadilan, sehingga masyarakat merasa dianak tirikan, Tujuan utama pemekaran daerah dalam hal ini kecamatan yaitu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berimplikasi luas terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri yang bersifat positif maupun negatif, tentunya hal tersebut perlu ditinjau secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Berangkat dari gambaran di atas penulis mencermati kondisi pemekaran Kecamatan Bhatin II Pelayang merupakan bahan kajian yang menarik untuk diteliti, karena dalam hal tersebut melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah pembentukan Kecamatan Bhatin II Pelayang. Maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemekaran kecamatan dengan mengangkat judul “Kecamatan Bhatin II Pelayang Pasca Pemekaran Di Kabupaten Bungo 2005-2020”. Diharapkan peneliti mampu memberikan gambaran yang sangat jelas tentang proses pemekaran Kecamatan Bhatin II Pelayang dan perkembangannya setelah dimekarkan dari Kecamatan Tanah Tumbuh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan penelitian merupakan metode sejarah yang meliputi Empat tahapan metode sejarah, antara lain: (Madjid:2015) Heuristik yaitu tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau. Oleh karena itu Pada tahapan ini penulis melakukan observasi dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, guna menghimpun sumber lisan. Kritik sumber yaitu suatu kegiatan untuk meneliti sumber-sumber yang diperoleh guna mengetahui kejelasan tentang

kredibilitasnya. Sementara Kritik Eksternal yaitu melakukan pengujian otentisitas atau keaslian dokumen yang diperoleh berhubungan dengan Kecamatan Bhatin II Pelayang pasca pemekaran. Interpretasi atau penafsiran merupakan suatu usaha untuk melihat kembali tentang data yang didapatkan untuk dijadikan sumber dalam penelitian. Historiografi merupakan penyajian hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah atau skripsi, yaitu penulisan laporan kembali dari data-data dan sumber-sumber yang telah diuji kebenarannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Kecamatan Bhatin II Pelayang Sebelum Pemekaran 2005**

Kecamatan Bhatin II Pelayang sebagai salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, secara geografis Kecamatan Bhatin II Pelayang terletak pada posisi  $-1,4399^{\circ}$  lintang selatan dan  $101,8446^{\circ}$  Bujur Timur. Bhatin II Pelayang sebelum pemekaran memiliki luas wilayah  $100.032 \text{ Ha}$  dan setelah dilakukannya pemekaran luas wilayah daerah Bhatin II Pelayang Menjadi  $179,85 \text{ km}^2$ . Batas - batas wilayah Kecamatan Bhatin II Pelayang Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jujuhan. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Tumbuh. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Tumbuh. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan limbur Lubuk Mengkuang dan Provinsi Sumatera Barat.

Penduduk asli Bhatin II Pelayang adalah mayoritas suku melayu Jambi. Kecamatan Bhatin II Pelayang terdiri dari 5 desa yaitu desa atau dusun Pulau Kerakap, Dusun Peninjau, Dusun Pelayang, Dusun Talang Silungko dan Dusun Semberang Jaya. Dengan jumlah penduduk Bhatin II Pelayang sebelum terjadinya pemekaran dari Tanah Tumbuh pada tahun 2004, jumlah penduduk mencapai 7867 Jiwa, serta kepala keluarga 2181 KK, sedangkan jumlah kepala keluarga dari empat desa tersebut berjumlah 2176 jiwa.

Kondisi pendidikan di Kecamatan Bhatin II Pelayang sebelum pemekaran masih kekurangan fasilitas sekolah, dari tingkat pendidikan TK sampai SMA, masih sangat terbatas. Sehubungan dengan itu, membuat para pelajar di Kecamatan Bhatin II Pelayang harus melanjutkan tingkat pendidikan SMA ke

desa tetangga dengan demikian, tidak dapat dipungkiri hal ini yang menyebabkan sering terjadinya tawuran antar pelajar bahkan sampai terjadinya bentrokan antar desa.

Kondisi kesehatan masyarakat Kecamatan Bhatin II Pelayang sebelum pemekaran di bidang kesehatan masih sangat minimnya fasilitas terutama, dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, hanya terdapat 1 puskesmas, dan 2 puskesmas pembantu di daerah ini. Disamping itu, dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata diperlukan juga kemudahan dalam keterjangkauan pembiayaan pengobatan terutama bagi masyarakat Kecamatan Bhatin II Pelayang yang memiliki penghasilan rendah, agar memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan pertolongan medis dan pengobatan yang baik. Sosial budaya masyarakat Kecamatan Bhatin II Pelayang masih memiliki adat dan tradisi yang sangat melekat. Pelestarian nilai-nilai luhur, kerukunan, keamanan, ketertiban dan toleransi dalam semangat gotong royong yang masih terjalin dan terbina didalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Bhatin II Pelayang.

#### **Ide Berdirinya Kecamatan Bhatin II Pelayang 2004**

Ide untuk memekarkan Pelayang dan menjadikan Pelayang sebagai kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Bhatin II Pelayang merupakan ide-ide yang tidak terlepas dari para tokoh masyarakat Pelayang, di antaranya kepala desa dari empat desa, yaitu Desa Pelayang, Desa Peninjau, Desa Talang Silungko Dan Desa Pulau Kerakap, dan empat ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh-tokoh masyarakat empat desa dan para pemuda lainnya. Terbentuknya tim perintis Kecamatan Bhatin II Pelayang yang berkeinginan untuk memekarkan diri dari wilayah induk memiliki tujuan untuk memperlancarkan pelayanan publik, memacu perkembangan ekonomi, membuka daerah yang terisolasi dan mendorong pembangunan daerah yang berpotensi tetapi terhambat. Keinginan yang dalam untuk membentuk suatu kecamatan baru yang dari dulu belum tercapai memunculkan jiwa-jiwa nasionalisme dari masyarakat maupun tim perintis kecamatan untuk membangkitkan kembali keinginan dari masyarakat

untuk menjadikan Pelayang sebagai kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Bhatin II Pelayang.

#### **Proses Pemekaran Kecamatan Bhatin II Pelayang 2004**

Proses pembentukan Kecamatan Bhatin II Pelayang didasarkan atas aspirasi dan keinginan masyarakat di Kecamatan Bhatin II Pelayang yang menginginkan dilakukan pemekaran karena mempertimbangkan beberapa alasan antara lain: *pertama*, Kecamatan Bhatin II Pelayang memiliki wilayah yang cukup luas dan telah memenuhi syarat untuk di mekarkan, dengan jumlah desa di kecamatan yaitu 4 desa. *Kedua*, didukung dengan jumlah penduduk di Kecamatan Bhatin II Pelayang serta ada beberapa desa yang memiliki jarak yang terlalu jauh untuk mencapai kantor pelayanan bagi masyarakat dan *ketiga*, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan Bhatin II Pelayang dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah.

Proses pemekaran begitu banyak pertimbangan yang harus dilakukan dalam pemekaran suatu wilayah, maka pada malam minggu, tanggal 02 Oktober 2004 bertempat di balai desa Peninjau, telah melaksanakan kembali rapat empat desa yaitu desa Pelayang, Peninjau, Talang Silungko, dan Pulau Kerakap. Pada tanggal 3 Oktober 2004, setelah mendengar dan menerima aspirasi dari masyarakat, panitia pemekaran Pelayang mengajukan permohonan Pemekaran empat desa dan mengusulkan Kecamatan Bhatin II Pelayang kepada Bupati Muara Bungo Zulfikar Achmad sebagai kecamatan baru dan memisahkan diri dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Tanah Tumbuh.

Hari Rabu pada tanggal 24 Agustus 2005 diadakan kembali pertemuan tentang berita acara kesepakatan batas rencana pemekaran Kecamatan Tanah Tumbuh Dengan Kecamatan Bhatin II Pelayang Kabupaten Bungo, kedua belah pihak menyatakan kesepakatan garis batas. Setelah penetapan batas rencana pemekaran, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2005 pertemuan kembali dilakukan dengan para Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Kecamatan Tanah Tumbuh dengan Pihak Legislatif dan Eksekutif serta camat Tanah Tumbuh, dalam rangka membahas pemekaran Kecamatan Tanah Tumbuh

menjadi Kecamatan Bhatin II Pelayang dengan kesepakatan kedua belah pihak tetap berpedoman pada pertemuan tanggal 24 Agustus 2005.

### **Lahirnya Kecamatan Bhatin II Pelayang 2005**

Lahirnya Kecamatan Bhatin II Pelayang sebagai wilayah yang definitif tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bhatin II Pelayang Kabupaten Bungo yang ditandatangani oleh Bupati Bungo Zulfikar Achmad. Peraturan daerah ini merupakan landasan dengan terbentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang di dalam wilayah Kabupaten Bungo setelah pemekaran dari Kecamatan Tanah Tumbuh dengan wilayah yang dimiliki yaitu, Desa Pelayang, Desa Peninjau, Desa Talang Silungko, dan Desa Pulau Kerakap dengan ibukota Kecamatan di Desa Pelayang.

Pada tanggal 5 Januari 2006 para tokoh masyarakat se Kecamatan Bhatin II Pelayang kembali melakukan keputusan musyawarah, hasil musyawarah tersebut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan telah dibentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang, maka harus diadakan acara peresmian atas terbentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang dengan membentuk panitia pelaksana supaya acara peresmian kecamatan bisa berjalan dengan baik. Pada tanggal 12 Januari 2006 keluarnya surat Keputusan Camat Bhatin II Pelayang dalam membentuk panitia pengukuhan dan peresmian Kecamatan Bhatin II Pelayang serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang terbentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang.

### **Perkembangan Kecamatan Bhatin II Pelayang Setelah Pemekaran 2005-2020**

Pembangunan infrastruktur setelah pemekaran di Kecamatan Bhatin II Pelayang selama 13 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang lebih baik, setelah pemekaran pembangunan lebih terfokuskan kepada kecamatan induk yaitu Kecamatan Bhatin II Pelayang. Fasilitas dan infrastruktur sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, pembangunan fisik maupun non fisik terus dilakukan di kecamatan ini, pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana pemerintahan seperti, kantor-kantor kelurahan, kantor KB, Kantor BPP, kantor KUA, perbaikan pasar, masjid, jembatan dan jalan. Pada tahun 2005 kecamatan ini sudah mulai menata pembangunan desa yaitu dengan malukan pelatakan batu pertama

pembangun SMA di Dusun Sebarang Jaya. Pembangunan gedung sekolah ini diharapkan bisa lebih mudah para pelajar di Kecamatan Bhatin II Pelayang untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih baik. Pada tahun 2007 perkembangan yang terjadi bisa dilihat dari bertambahnya 1 dusun di Kecamatan Bhatin II Pelayang yaitu Dusun Sebarang Jaya. Total dusun yang ada di Kecamatan Bhatin II Pelayang pada tahun 2020 menjadi 5 dusun yang terdiri dari Dusun Pelayang, Dusun Peninjau, Dusun Pulau Kerakap, Dusun Talang Silungko dan Dusun Sembarang Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 128.

Progres perkembangan Kecamatan Bhatin II Pelayang juga terlihat pada tahun 2008 dengan melakukan pembangunan pelatakan batu pertama terhadap pembangunan kantor camat, kantor puskesmas dan kantor KUA dalam rangka untuk melengkapi sarana dan prasarana sekaligus untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bhatin II Pelayang. Pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan Bhatin II Pelayang terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 dilakukan pembangunan pada tingkat pendidikan TK, yaitu TK Aljafar di Dusun Pelayang dan PAUD Pertiwi di Dusun Pulau Kerakap. Peningkatan pembangunan sarana pendidikan pada tingkat PAUD juga mengalami progress yang baik pada tahun 2015 yaitu bertambah 5 buah PAUD di setiap Dusun yang ada di kecamatan, selain itu pembangunan tower jaringan internet di desa Pelayang juga dilakukan guna mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi melalui jejaringan internet. Pada tahun 2016, 2 sarana pendidikan bertambah lagi pada tingkat pendidikan TK di Dusun Pulau Kerakap serta pada tahun 2018 bertambah lagi 1 TK Harapan Bangsa di Dusun Talang Silungko.

## **KESIMPULAN**

Latar belakang proses pemekaran Kecamatan Bhatin II Pelayang pada dasarnya tidak lepas dari keinginan masyarakat itu sendiri sehingga memunculkan beberapa tokoh dalam melakukan pemekaran untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di daerahnya, masyarakat yang berkeinginan supaya terciptakan efisiensi dan efektivitas

dalam pengelolaan potensi daerah dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpacu dalam proses pembangunan.

Perkembangan Kecamatan Bhatin II Pelayang Pasca Pemekaran mengalami perubahan, rentan kendali jarak yang jauh dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat sudah tidak jadi permasalahan lagi, karena setelah pemekaran pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih mudah dijangkau dan lebih dekat dalam mengurus segala keperluan. Pemekaran membawa perubahan bagi Kecamatan Bhatin II Pelayang maupun bagi masyarakatnya sendiri, setelah pemekaran perlahan-lahan pembangunan mulai dilakukan, dari pembangunan fasilitas pendidikan seperti SMA, pembangunan Puskesmas yang lebih baik dari sebelum pemekaran, pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu bertambah nya desa dan fasilitas sekolah.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ferizaldi. 2016. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*. Sulawesi: unimal press.
- Hisyam, Djihad. 2015. "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Pembangunan." *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i1.3803>.
- Madjid, Abd rahmad hamid dan muhammad saleh. 2015. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Mahmuzar, -. 2020. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2: 302. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590>.
- Mudrajad Kuncoro. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota Dan Kawasan*. Jakarta: Salambe Empat.
- Muqoyyidin, A. 2013. "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2: 287–310.
- Pantow, Claudia, Jhon Kaawoan, Neni Kumayas, and Pemekaran Kecamatan. 2019. "Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3.
- Rozali, Abdulllah. 2000. *Pelaksanaan Otonom Luas Dan Isu Federalisme*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syadzily, Ace hasan. 2019. *Desentralisasi Otonomi Dan Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Predana Media Group.